



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**LOGISTICS**

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**2023**

Direktorat Logistik  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk  
Kelautan dan Perikanan



**#Logistics4competitiveness**

**#KITAPDS**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2022 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 18 Oktober 2023

Direktur Logistik



**Berny A. Subki**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan;
- (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP;
- (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik;
- (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi;
- (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan;
- (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan;
- (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang;
- (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan;
- (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen;
- (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton;
- (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku;
- (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku;
- (15) Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP;
- (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan
- (17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik

Sasaran strategis di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, seluruh Sasaran Srategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan III Tahun 2023 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2023 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia .....	3
1.5 Permasalahan Utama .....	4
1.6 Sistematika Penyajian .....	5
<b>II. Perencanaan Kinerja</b> .....	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.1.1 Sasaran Kegiatan .....	8
2.1.2 Kebijakan .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja .....	9
<b>III. Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>11</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	16
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik .....	66
<b>IV. Penutup</b> .....	<b>70</b>
4.1. Kesimpulan .....	70
<b>V. Lampiran</b> .....	<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Gambar 1.	Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja .....	3
Gambar 2.	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin .....	4
Gambar 3.	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan .....	4
Gambar 4.	Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjajaku .....	11
Gambar 5.	Kegiatan Pemantauan pemasukan hasil perikanan dan monitoring rantai pasok koridor Mimika – Jawa .....	18
Gambar 6.	Sosialisasi STELINA di Kota Semarang .....	20
Gambar 7.	Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Aplikasi STELINA di Provinsi Banten .....	21
Gambar 8.	Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Semester I Tahun 2023 .....	22
Gambar 9.	Rapat Penyusunan Kajian Teknis Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan .....	23
Gambar 10.	Rapat Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan .....	24
Gambar 11.	Identifikasi Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	28
Gambar 12.	Rapat Pembahasan Digitalisasi Tata Kelola Rantai Pasok .....	29
Gambar 13.	Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Neraca Komoditas Perikanan .....	31
Gambar 14.	Rapat Sinkronisasi Tata Laksana Pemasukan Hasil Perikanan Berdasarkan Mekanisme Neraca Komoditas di Wilayah Perbatasan Khususnya di Nunukan dan Sebatik .....	32
Gambar 15.	Rapat Lanjutan Pengembangan Inhouse System Neraca Komoditas Perikanan .....	33
Gambar 16.	Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan dalam mendukung Industri Pemindangan .....	35
Gambar 17.	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan Distribusi Hasil Perikanan Menggunakan Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara .....	37
Gambar 18.	Uji Petik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan .....	37
Gambar 19.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 .....	38

	Sebagai Dasar Pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	
Gambar 20.	FGD Fasilitasi Kemitraan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi Bahan Baku Pindang	39
Gambar 21.	Klarifikasi dan Survei Pasar Produk Gudang Beku Portable PT Cahaya Mas Cemerlang	42
Gambar 22.	Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	43
Gambar 23.	Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Tamraw	43
Gambar 24.	Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Biak Numfor	44
Gambar 25.	Rapat Monitoring Progres Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi TA 2023 dan Persiapan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi Tahap 3	47
Gambar 26.	Koordinasi Pengembangan SRG Rumput Laut dengan Bappebti	49
Gambar 27.	Rapat Tindaklanjut Permohonan Izin Penggunaan Cold Storage 2000 Ton dan Kerjasama Program Sistem Resi Gudang (SRG) oleh PT Perindo	50
Gambar 28.	Inisiasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut di Kabupaten Tangerang	51
Gambar 29.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut dan di Darat	54
Gambar 30.	Sosialisasi Warehouse Management Syster (WMS) Versi 1.0	56

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Logistik	9
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan III Tahun 2023	12
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	17
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	19
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	21
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	27
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	29
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	34
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	36
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	40
Tabel 11.	Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia GBP	40
Tabel 12.	Target dan capaian IK 9	44
Tabel 13.	Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia Kendaraan Berefrigerasi	45
Tabel 14.	Target dan capaian IK 10	47
Tabel 15.	Target dan capaian IK 11	51
Tabel 16.	Target dan capaian IK 12	53
Tabel 17.	Target dan capaian IK 13	54
Tabel 18.	Target dan capaian IK 14	55
Tabel 19.	Target dan capaian IK 15	57
Tabel 20.	Target dan capaian IK 16	58
Tabel 21.	Target dan capaian IK 17	59
Tabel 22.	Target dan capaian IK 18	60
Tabel 23.	Target dan capaian IK 19	61
Tabel 24.	Target dan capaian IK 20	62
Tabel 25.	Target dan capaian IK 21	62
Tabel 26.	Target dan capaian IK 22	63
Tabel 27.	Target dan capaian IK 23	64
Tabel 28.	Target dan capaian IK 24	64
Tabel 29.	Target dan capaian IK 25	65
Tabel 30.	Target dan capaian IK 26	66
Tabel 31.	Realisasi anggaran Direktorat Logistik	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan. Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan Tahun 2023.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan III Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan III Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

## **1.3 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 1133/SJ.3/OT.210/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

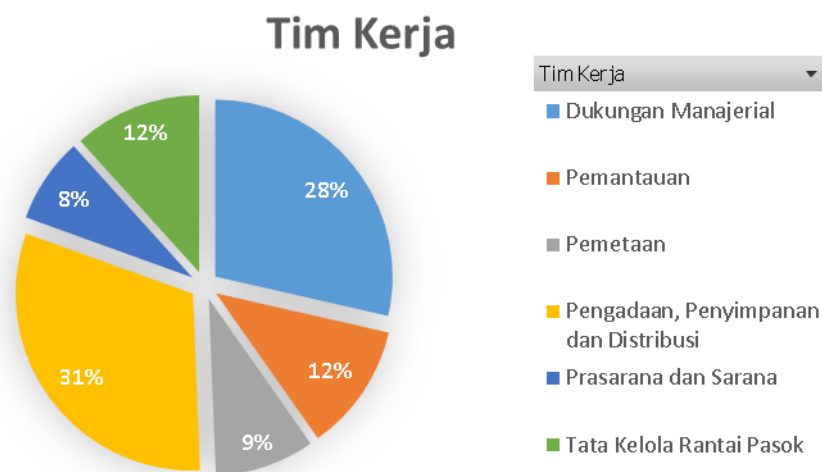
Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi;
4. Tim Kerja Pemantauan;
5. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
6. Tim Kerja Dukungan Manajerial

#### 1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 77 orang, dengan rincian sebagai berikut:

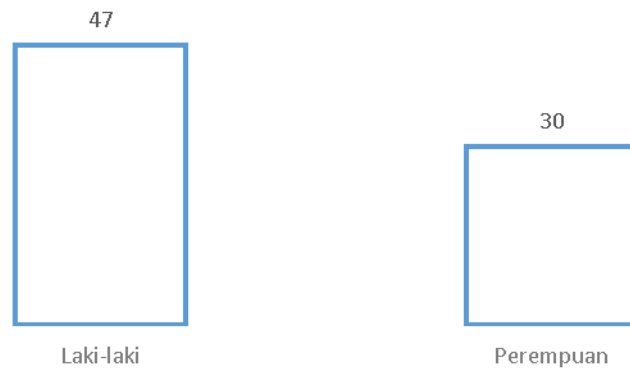
1. Jumlah pegawai menurut Tim Kerja  
Apabila dilihat dari gambar di bawah, jumlah pegawai menurut tim kerja terbanyak terdapat di Tim Kerja Dukungan Manajerial, yakni 22 orang, atau sekitar 28% dari total pegawai Direktorat Logistik. Sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di Tim Kerja Prasarana dan Sarana, yakni 6 orang atau setara dengan 8% dari total jumlah pegawai Direktorat Logistik.



Gambar 1. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

2. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 47 orang, atau setara dengan 61% dari total pegawai Direktorat Logistik, dan perempuan sebanyak 30 orang, atau setara dengan 39% dari total pegawai Direktorat Logistik.

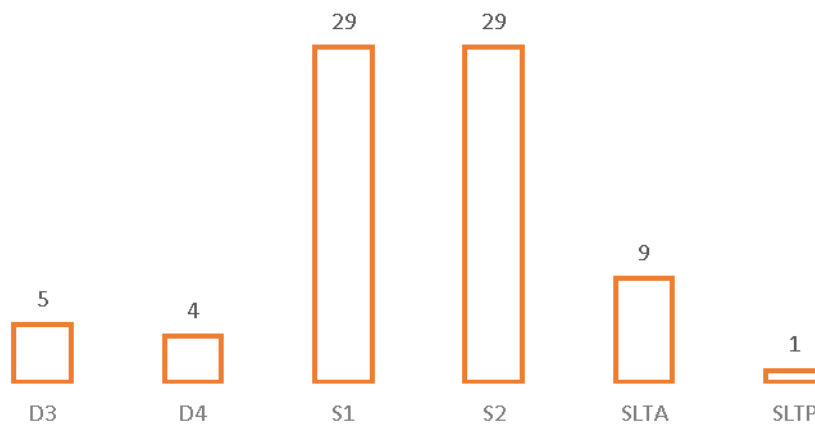
## Jenis Kelamin



Gambar 2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S2 sebanyak 29 orang, S1 sebanyak 29 orang, D4 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 9 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

## Pendidikan



Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

### 1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
2. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;

3. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
4. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
5. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
6. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
7. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
8. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan III Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama TW III tahun 2023;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

#### VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

#### MISI

**Kedaulatan (Sovereignty):**  
mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

**Keberlanjutan (Sustainability):**  
mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

**Kesejahteraan (Prosperity):**  
mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

### **2.1.1 Sasaran Kegiatan**

Direktorat Logistik pada tahun 2023 mempunyai 17 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP; (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik; (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi; (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan; (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan; (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan; (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang; (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan; (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen; (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku; (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (15) Tercapainya Nilai PNBPDitjen PDSPKP; (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan (17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik.

### **2.1.2 Kebijakan**

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.



## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	2
4.	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	1
		5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	1
5.	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	6.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	18
6.	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	7.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	18
7.	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	8.	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	19
8.	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	9.	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	26
9.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	8
10.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	3
11.	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	12.	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
12.	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	13.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	1
13.	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	14.	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1
14.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	15.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	242
15.	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	16.	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	6,66
16.	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	17.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	1.215
17.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	18.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	83,2
		19.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	80,5
		20.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	≤0,5
		21.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	75
		22.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		23.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95
		24.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		26.	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5

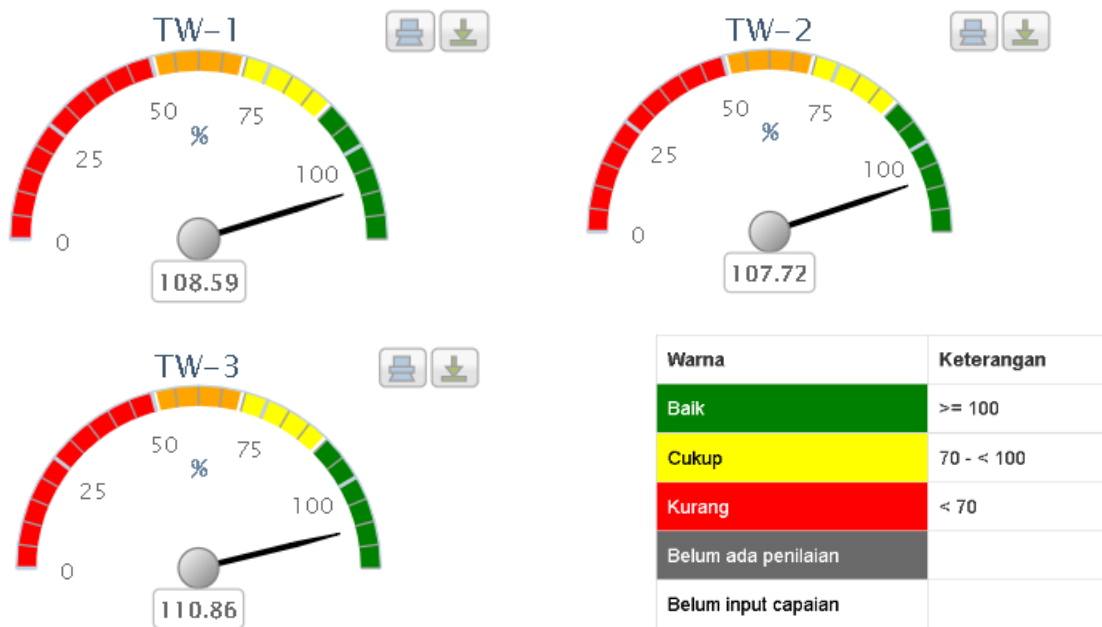
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Juli sampai dengan September 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan TW III sebesar 110,86. Nilai capaian TW III naik 3,14 poin atau sebesar 2,9% dari capaian TW II. Jika dibandingkan dengan capaian periode sama tahun 2022 sebesar 106,74, maka terjadi peningkatan sebesar 4,12 poin.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW III	sd TW III		
1	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor)	Koridor	5	-	-	-	PA
2	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
3	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	-	-	-	PA
4	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	-	-	-	PA
		Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	-	-	-	PA
5	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	14	16	114	PA
6	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	13	13	100	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW III	sd TW III		
7	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	-	-	-	PA
8	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	-	-	-	PA
9	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	6	6	100	PA
10	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	1	2	200	PA
11	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	-	-	-	PA
12	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
13	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	-	-	-	PA
14	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	-	-	-	PA
15	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	Miliar	6,66	-	-	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW III	sd TW III		
16	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	Orang	1.215	-	-	-	PA
17	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	83,2	-	-	-	PA
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	Nilai	80,5	-	-	-	PA
		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	≤0,5	-	-	-	PA
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	75	75	98	130,66	RR
		Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	Persentase	92	92	133,3	144,92	PA
		Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	95	-	-	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW III	sd TW III		
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA

## 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

### 3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

#### 1. Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Definisi indikator ini adalah Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (storage), transportasi (transportation), dan pelayanan (delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (material management) dan (b) distribusi. Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (point of origin) ke titik tujuan (point of destination) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2023 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola.

Data dukung berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.



Tabel 3. Target dan capaian IK 1

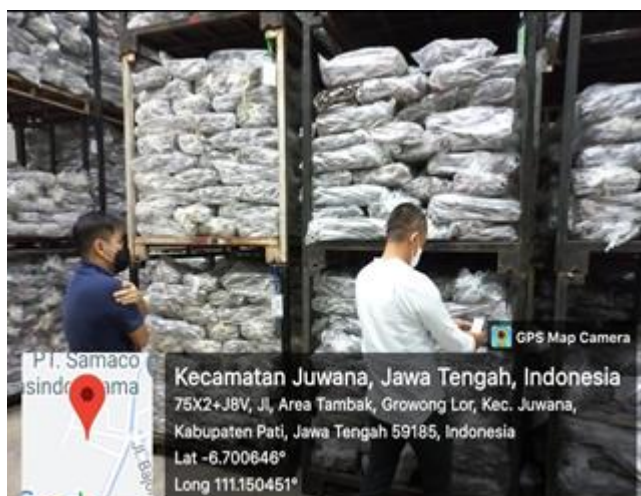
No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
1	SK1. Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan						
	IK1. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Koridor	PA	-	5	-	-

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1.1. Pemantauan pemasukan hasil perikanan dan monitoring rantai pasok koridor Mimika – Jawa

Kegiatan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dalam rangka monitoring rantai pasok koridor Mimika-Jawa. Tujuannya adalah melakukan monitoring kegiatan Dalam koridor logistik. Pelaku usaha yang berperan dalam rantai pasok Koridor Mimika-Jawa berperan langsung sebagai penangkap ikan (pemilik kapal) yang mendaratkan ikannya di pangkalan dobo dan mimika. Musim ikan puncak biasanya ada di bulan September dan Oktober. Proses rantai pasok dilakukan dengan pengiriman ikan beku kapal (*frozen on board*) yang didaratkan di Mimika/Dobo dan dipindahkan ke kontainer berpendingin 20 feet (kapasitas 14 ton) yang selanjutnya dibawa kapal kargo menuju pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya.

Selanjutnya kontainer dibawa menggunakan truk hingga sampai di Pati dan di simpan di gudang berpendingin sebelum didistribusikan ke pelaku pengolah dan pemasar terutama di daerah Jawa Timur dan Jakarta. Hingga tiba di Pati tidak ada perubahan pelaku rantai pasok yaitu pelaku usaha penangkapan. *Freight forwarder*/jasa logistik pengiriman Dobo/Mimika-Surabaya (Tj Perak) - Pati dilakukan oleh Rahayu Perdana Trans dengan tarif Rp55.000.000,- per kontainer (pengiriman *door to door* hingga tujuan Pati) sudah termasuk asuransi.



Gambar 5. Kegiatan Pemantauan pemasukan hasil perikanan dan monitoring rantai pasok koridor Mimika – Jawa

### 3.2.2. Sasaran Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

#### 2. Indikator Kinerja Kegiatan Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) mempunyai tugas salah satunya sebagai penyelenggara pelayanan kepada para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (UPI: Unit Pengolahan Ikan) dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar global. Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah terkait dengan ketelusuran (*traceability*) produk perikanan. Agar suatu produk dapat ditelusuri riwayat asal maupun rantai distribusinya dengan mudah, produsen harus memiliki catatan dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan produknya mulai dari bahan baku, proses pengolahan selama distribusi/penyimpanan, pemasaran hingga ke tangan konsumen. Dengan demikian, dalam sistem ketertelusuran diperlukan metode yang handal untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan. Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data

adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
2	SK2. Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						
	IK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III terdapat beberapa kendala yaitu terdapat kendala teknis pada aplikasi STELINA dan kurangnya kesadaran pelaku usaha yang masih rendah untuk melakukan implementasi STELINA. Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp353.667.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Realisasi keuangan sampai dengan TW III sebesar Rp1.227.610.461,- atau sebesar 74,56% dari pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 2.1. Sosialisasi STELINA di Kota Semarang

Kegiatan dilaksanakan pada 13 September 2023, dipimpin oleh Katimja Pemantauan mewakili Direktur Logistik, serta dihadiri oleh Katimja Pemetaan, perwakilan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas, perwakilan DKP Provinsi Jawa Tengah, DKP Kota Semarang, PPP Bajomulyo, Anggota Tim Pendataan Stok dan Pendampingan Implementasi STELINA di 20 lokasi, dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran di Jawa Tengah. Keseluruhan peserta hadir sebanyak 125 orang (30 peserta luring dan 95 peserta daring).

Kegiatan bertujuan untuk melakukan sosialisasi STELINA dan SRG, pelatihan teknis pendataan stok ikan di gudang beku, serta melakukan pelatihan teknis aplikasi STELINA. Pelaporan pada aplikasi STELINA bersifat wajib bagi importir produk perikanan. Sanksi administratif berlaku jika laporan tidak disampaikan sebagaimana tercantum pada PerMen KP No. 06 Tahun

2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan. Sanksi dimaksud berupa penundaan pengusulan perubahan Neraca Komoditas tahun berjalan, atau penundaan penetapan rencana kebutuhan impor tahun berikutnya.



Gambar 6. Sosialisasi STELINA di Kota Semarang

## 2.2. Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Aplikasi STELINA di Provinsi Banten

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 di Kota Tangerang, dibuka oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, serta dihadiri oleh pelaku usaha ekspor yang ada di Provinsi Banten. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan Informasi berupa kebijakan mengenai stelina dan ketertelusuran hasil perikanan, pendataan stok ikan di gudang beku, serta teknis registrasi dan input data pada aplikasi Stelina. Dasar hukum implementasi Stelina adalah dari PP No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 100 dan 101 yang mengamanatkan penerapan ketertelusuran, yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.

Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran Aplikasi Stelina terbagi menjadi dua akun, yaitu akun pemasar dan akun pengolah. Akun pemasar digunakan bagi middlemen dan supplier yang hanya melakukan proses jual beli ikan, sedangkan akun pengolah digunakan bagi pelaku usaha yang melakukan proses pengolahan ikan (unit pengolahan ikan/UPI). Diharapkan dari kegiatan ini, pelaku usaha eksportir yang menghadiri kegiatan ini telah teregistrasi dalam aplikasi STELINA dan telah memahami cara melakukan input data pada aplikasi STELINA.



Gambar 7. Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Aplikasi STELINA di Provinsi Banten

### 3.2.3. Sasaran Kegiatan Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi logistik hasil KP (Data)

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, dan data pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2023 adalah 2 (dua) Data dan Informasi Logistik Hasil KP. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
3	SK3. Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP						
	IK3. Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Unit	PA	-	2	-	-

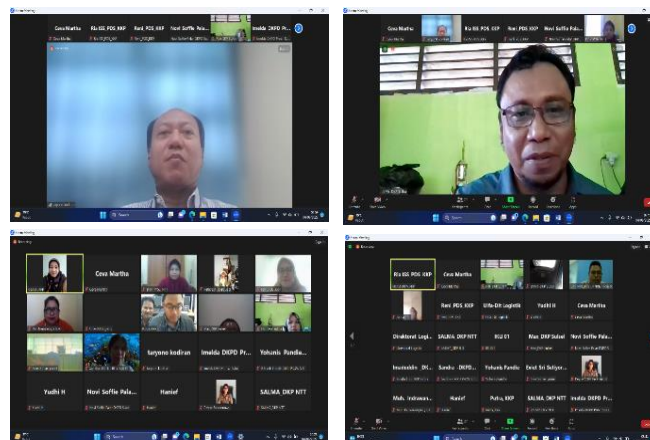
Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III terdapat kendala yaitu responden IKLI belum memiliki pemahaman dalam pengisian kuisioner penghitungan IKLI khususnya pada dimensi pengelolaan pengadaan hasil

perikanan dan pelaku usaha belum mempunyai inisiatif dalam pengisian kuisisioner data stok setiap bulannya. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp1.467.500.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp440.250.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp619.355.334,- atau sebesar 60,29% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

### 3.1. Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Semester I Tahun 2023

Rapat dilaksanakan pada hari jum'at, 4 Agustus 2023 di ruang rapat Mimika GMB 3 Lt. 12. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan dihadiri oleh Dr. Taryono Kodiran (IPB University), anggota tim dan enumerator IKLI Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, NTT dan Kab. Mimika serta tim kerja lingkung Dit. Logistik. Tujuan rapat adalah membahas penilaian kinerja logistik ikan untuk mendalami performa dari Sistem Logistik Ikan Nasional dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penghitungan IKLI semester I tahun 2023 akan dilaksanakan berdasarkan hasil survey terhadap 98 responden pada 6 (enam) koridor logistik ikan, yaitu:

- a) Bitung-Surabaya/Jakarta
- b) Kendari-Surabaya/Jakarta
- c) Mimika-Surabaya/Jakarta
- d) Kupang-Surabaya/Jakarta
- e) Makassar-Surabaya/Jakarta
- f) Ambon-Surabaya/Jakarta



Gambar 8. Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Semester I Tahun 2023

### 3.2. Rapat Penyusunan Kajian Teknis Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 di ruang rapat Mimika GMB 3 Lt. 12. Rapat dipimpin oleh ketua tim kerja Pemetaan dan dihadiri oleh ketua tim kerja Pemantauan dan Analisis Kepelabuhan Perikanan, DJPT serta Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Dit. Kepelabuhan Perikanan. Tujuan rapat adalah membahas Kajian teknis dimaksud disusun dengan tujuan sebagai data dukung Perubahan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan. Hal-hal yang dibahas antara lain sebagai berikut :

- Penambahan lokasi pelabuhan pangkalan berdasarkan hasil konfirmasi dari pembahasan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia mempertimbangkan pada kesiapan kondisi lokasi pelabuhan pangkalan dan status saat ini terkait operasional kegiatan penangkapan ikan dari kapal izin daerah yang beroperasi diatas 12 mil laut yang berpotensi bermigrasi menjadi kapal izin pusat.
- Monitoring awal dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan perikanan melalui pejabat syahbandar dalam menerbitkan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, dan juga petugas pendataan produksi ikan di pelabuhan perikanan yang melakukan pengamatan dan pencatatan data produksi ikan pada saat penimbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- Evaluasi pelaksanaan Harga Acuan Ikan PNBK Pascaproduksi dilakukan secara periodik oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui otoritas pelabuhan perikanan secara berkala sehingga kegiatan operasional kapal perikanan lebih optimal.



Gambar 9. Rapat Penyusunan Kajian Teknis Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan

### 3.3. Rapat Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Rapat dilaksanakan pada hari rabu, 20 September 2023 di ruang rapat akses pasar GMB 3 Lt. 15. Rapat dipimpin oleh ketua tim kerja Pemetaan dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok Data dan Statistik, Pusdatin; Sub Kelompok Kerja Data, Setditjen Perikanan Tangkap, Perwakilan Tim Kerja Kelompok Data, Setditjen Perikanan Budidaya, Tim Kerja Hukum, Sesditjen PDSPKP, Ketua Tim Kerja Kemitraan Usaha, Direktorat Usaha dan Investasi, Tim Kerja Pembinaan Pada Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Analis Pasar Hasil Perikanan, Direktorat Pemasaran, dan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok. Tujuan rapat adalah menyusun neraca komoditas perikanan tahun 2023. Hal-hal yang dibahas antara lain tim penyusun Neraca Komoditas Perikanan harus disahkan oleh Menteri KP berdasarkan PERMEN no 6 terkait neraca Komoditas. Tim Neraca Komoditas sudah terbit yaitu Kep Men No 153 Tahun 2023 Tim Penyusun Data Neraca Komoditas.



Gambar 10. Rapat Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

### 3.4. Perkembangan Pasokan, Harga, Stok Ikan dan Inflasi

Dalam upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan ikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap data dan informasi logistik ikan. Untuk itu, Direktorat Logistik telah membentuk Tim Pemantauan Logistik Ikan yang melibatkan unit kerja terkait. Tugas dari tim tersebut diantaranya menyiapkan dan menganalisis data produksi perikanan yang bersumber dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, ketersediaan (stok) ikan di Cold Storage (CS) serta data inflasi yang disebabkan oleh komoditas perikanan serta data lainnya yang terkait dengan logistik hasil perikanan.

#### a) Analisis Produksi Perikanan Tangkap



Volume pendaratan ikan tertinggi pada Bulan Agustus berasal dari PPS. Nizam Zachman, Kota Jakarta Utara sebesar 9.653,94 ton. Selanjutnya diikuti wilayah lain seperti Tasik Agung, Brondong, Tegalsari, Bitung, Prigi, Sibolga, Cilacap, Dobo dan Klidang Lor. Jenis ikan utama yang diproduksi pada 10 pelabuhan tersebut yaitu cakalang, layang, tongkol, cumi-cumi, madidihang, kurisi, swanggi, kuniran, tuna dan kapas-kapas. Berdasarkan data harga di tingkat nelayan pada bulan Agustus 2023, rata-rata harga ikan di tingkat produsen mengalami penurunan 5%-25% dengan penurunan tertinggi adalah komoditas kerapu, dari sebelumnya Rp. 50.900,-/Kg pada bulan Juli 2023 turun menjadi Rp. 37.800,-/Kg di bulan Agustus 2023.

b) Analisis Produksi Perikanan Budidaya

Volume produksi perikanan budidaya bersumber dari Satu Data, KKP. Total volume produksi budidaya berdasarkan Satu Data pada Bulan Agustus 2023 adalah sebesar 144,66 ton yang berasal dari 49 kab/kota, naik 3,17% dibandingkan bulan Juli 2023 sebesar 140,22 ton yang berasal dari 24 kab/kota. Volume produksi ikan budidaya tertinggi pada bulan Agustus berasal dari Kota Banjarbaru sebesar 14,22 ton. Selanjutnya diikuti kab lain seperti Kab. Sinjai, Pidie, Lamongan, Kudus, Jombang, Lampung Selatan, Kota Banjarmasin, Hulu Sungai Utara dan Bojonegoro. jenis ikan budidaya yang dominan pada bulan Agustus berturut-turut yaitu lele (31,76%), rumput laut (14,33%), nila (13,07%), bandeng (11,41%), udang vaname (11,02%), patin (5,38%), toman (3,59%), bawal tawar (3,35%), kerapu macan (1,97%) dan lainnya (4,13%). Sedangkan kenaikan harga tertinggi terjadi pada bandeng sebesar 56,91% dari sebelumnya Rp. 18.800,-/Kg pada bulan Juli naik menjadi Rp. 29.500,-/Kg di bulan Agustus 2023. Sementara itu ikan lele, patin, toman dan udang windu mengalami penurunan harga pada bulan Agustus 2023. Penurunan tertinggi terjadi pada udang windu sebesar 7,29% dari sebelumnya Rp. 85.000,-/Kg pada bulan Juli 2022 turun menjadi Rp. 78.800,-/Kg.

c) Stok cold storage

Berdasarkan pendataan stok ikan di CS yang dilakukan oleh tim pusat maupun enumerator daerah, pada Bulan Agustus telah terkumpul data stok ikan di 212 CS milik pemerintah, BUMN dan swasta yang tersebar di 75 kabupaten/kota di Indonesia sebesar 22.802 ton (26,85%) dari total kapasitas 84.925 ton. Stok ikan di bulan Agustus 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Agustus 2022 dimana stok bulan Agustus 2022 sebesar 22.459 ton (22,40%) dari total kapasitas 100.263 ton.

d) Inflasi ikan

Beberapa komoditas ikan yang memberikan andil inflasi terbesar terhadap inflasi umum nasional pada bulan Agustus 2023 yaitu:

1) Bandeng

Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk bandeng berada di Kota Jember, Merauke dan Probolinggo

- 2) Kembang  
Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk kembang berada di Kota Ternate, Bulukumba dan Padang.
  - 3) Malalugis  
Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk malalugis berada di Kota Ternate, Gorontalo, Kotamobagu
  - 4) Cakalang  
Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk cakalang berada di Kota Manokwari, Palu dan Mamuju
  - 5) Kakap Merah  
Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk lele berada di Kota Waingapu, Ternate dan Manokwari
- Volume pendaratan ikan tuna berdasarkan data dari PIPP pada bulan Agustus 2023 mengalami kenaikan sebesar 74,55% dibandingkan bulan Juli 2023. Kenaikan produksi ikan tuna dianalisis sebagai faktor yang menyebabkan komoditas ikan tuna mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,34% pada bulan Agustus 2023.

#### **3.2.4. Sasaran Kegiatan Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik**

#### **4. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)**

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok.

Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan target pada Triwulan IV sebesar 1 lembaga.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sdTWIII	TA 2023	TWIII	% thd target TW4
4	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK4. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp490.254.051,- atau sebesar 70,03% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 4.1. Identifikasi Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Agustus 2023 di PPS Kendari. Tujuannya adalah mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dimana PPS Kendari telah memiliki ruang kontrol untuk memantau keluar masuk kapal di Dermaga PPS Kendari. Dari ruang kontrol, secara real time sudah dapat dipantau kegiatan pelabuhan mulai dari tambat labuh, pendaratan, penghitungan PNBP hingga pasokan ikan. Namun pasokan berupa volume dan harga baru disajikan sehari setelahnya karena perlu verifikasi pencocokan antara logbook dan hasil penimbangan. PPS kendari sudah menyediakan dashboard yang dapat diakses oleh umum sehingga dapat menjadi informasi bagi pihak yang membutuhkan. Volume produksi dalam PPS Kendari sebanyak 11.426.689 kg dengan nilai Rp212.092.100.900,- sedangkan ikan yang masuk ke PPS Kendari pada periode yang sama sebesar 44.920 kg dengan nilai produksi Rp.21.268.790.000,-. Komoditas dominan di dalam PPS Kendari yaitu ikan cakalang, layang deles, layang pectoral pendek dan madidihang. Sedangkan komoditas dari luar didominasi gurita, layang, udang putih. Wilayah produksi luar pelabuhan antara lain dari Wanci, Kendari, Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana. Pemasaran ikan dari PPS Kendari antara lain ke Kab.Morowali, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari, Kab. Konawe, Enrekang, Kolaka Utara dan Toraja.



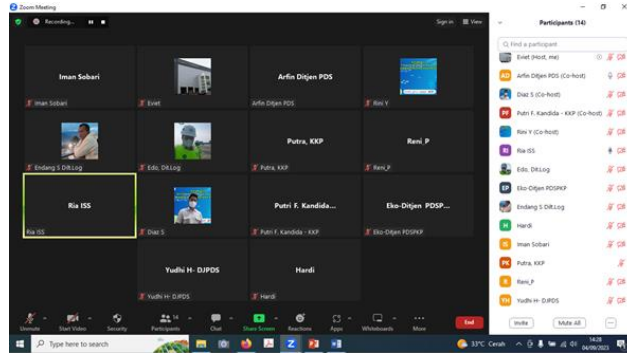
Gambar 11. Identifikasi Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

#### 4.2. Pembahasan Digitalisasi Tata Kelola Rantai Pasok

Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023 dilaksanakan secara Daring dan Luring, RR Dit. Logistik, Lantai 12 GMB 3 KKP. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Sekretaris Ditjen PDSPKP, Perwakilan Tim Kerja Pemetaan - Dit. Logistik, Perwakilan Tim Kerja Pemantauan - Dit. Logistik, Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Dit. Logistik. Dilaporkan Tujuan rapat adalah membahas rencana digitalisasi tata Kelola rantai pasok.

Perkembangan digitalisasi merupakan sebuah proses perubahan positif yang perlu diadaptasi termasuk ke dalam sistem informasi sektor perikanan. Mengacu ke Permen KP Nomor 58 Tahun 2021, salah satu pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional adalah pengembangan informasi ketersediaan ikan waktu nyata dalam rangka digitalisasi tata kelola rantai pasok. Perlu dilakukan perubahan digitalisasi stok real time dalam pendataan stok ikan di CS yang saat ini telah dilakukan oleh Timja Pemetaan.

Digitalisasi ini direncanakan akan berbasis google spreadsheet yang user friendly, sehingga mudah diakses. Aplikasi WMS versi 1.0 telah selesai dibangun pada tahun 2022, namun belum disosialisasi dan diimplementasikan (go live). Secara garis besar, aplikasi ini digunakan untuk mengelola gudang beku dan mencatat ikan keluar masuk. Pada tahun 2023 ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan ios dan rencana integrasi dengan PNBPN.



Gambar 12. Rapat Pembahasan Digitalisasi Tata Kelola Rantai Pasok

## 5. Indikator Kinerja Kegiatan Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Pemasukan hasil perikanan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku nasional. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
5	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)	Unit	PA	-	1	-	-

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)

dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp516.221.011,- atau sebesar 73,74% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 5.1. Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Neraca Komoditas Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023, dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Perwakilan Pusdatin, Koordinator Kelompok Tata Niaga, Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, Perwakilan Bagian Hukum Ditjen PDS Subkoordinator Kelompok Tata Laksana Pemasukan, Subkoordinator Kelompok Tata Logistik, serta Pelaksana Kelompok Tata Niaga. Tujuan rapat adalah rangka penyempurnaan tata kelola neraca komoditas perikanan. KKP telah menerbitkan ketentuan teknis pelaksanaan neraca komoditas perikanan sebagaimana amanat Perpres No. 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas yaitu Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Keputusan Menteri KP No. 80 tahun 2022 tentang Jenis Hasil Perikanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam implementasinya terdapat kendala yang berpengaruh terhadap belum efektifnya pelaksanaan tata kelola neraca komoditas antara lain terjadi penyalahgunaan jenis penggunaan/peruntukan hasil perikanan impor, hasil perikanan impor masuk pada musim ikan di dalam negeri sehingga berpotensi mempengaruhi daya saing hasil perikanan dalam negeri dan Pengguna hasil perikanan impor (supplier dan pengolah) belum teregistrasi (NIB) serta belum memiliki perizinan berusaha di bidang pengolahan/pemasaran hasil perikanan sehingga ketertelusuran hasil perikanan impor belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan Permen KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.



Gambar 13. Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Neraca Komoditas Perikanan

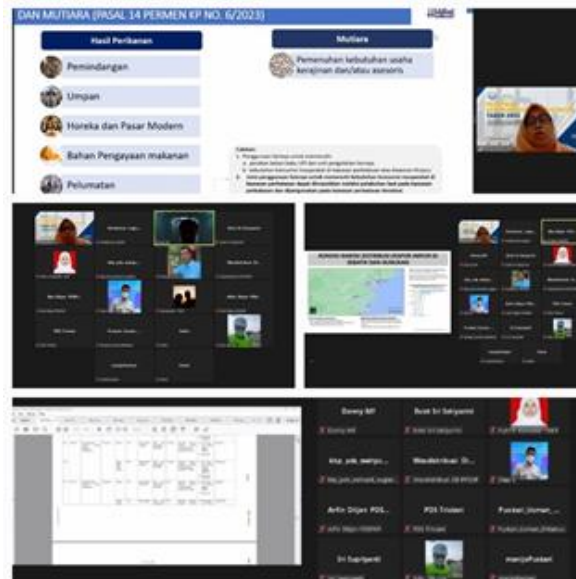
#### 5.2. Rapat Sinkronisasi Tata Laksana Pemasukan Hasil Perikanan Berdasarkan Mekanisme Neraca Komoditas di Wilayah Perbatasan Khususnya di Nunukan dan Sebatik

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Dit Logistik, dan dihadiri oleh perwakilan dari: Dit. PPSDP Ditjen PSDKP, Pusat Karantina Ikan, Setditjen PDSPKP, dan Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik. Tujuan rapat adalah membahas tata laksana pemantauan pemasukan hasil perikanan di pintu pemasukan dan pengawasan distribusi hasil perikanan impor di kawasan perbatasan. Sebagaimana diatur dalam perpres 32, pelaksanaan pengajuan usulan RK tahun 2024 dapat diajukan pada Bulan September 2023. Pelaku usaha telah diinformasikan melalui surat terkait pengajuan usulan RK 2024.

Pada permen KP 6 tahun 2023 terdapat penambahan peruntukan yaitu penggunaan lainnya, yang didasari atas surat permohonan dari Pemda di wilayah perbatasan untuk diskresi pemasukan komoditas perikanan di wilayah perbatasan. Rencana pembukaan akses importasi untuk pelaku usaha di wilayah perbatasan tersebut, khususnya di Sebatik dan Nunukan. Berdasarkan pencermatan di tahun 2023, pemasukan ilegal marak terjadi di wilayah perbatasan. Yang menjadi kendala, importasi yang diatur melalui mekanisme NK, dikhususkan untuk jenis penggunaan tertentu (pemindangan, umpan, horeka dan pasar modern, bahan pengayaan makanan, pelumatan dan penggunaan lainnya). Sedangkan ikan yang diimpor di wilayah perbatasan umumnya adalah ikan-ikan yang ada di wilayah Indonesia juga.

Dengan demikian perlu diskresi tersendiri, apakah hal tersebut masuk ke jenis penggunaan lainnya atau apakah ada solusi lainnya. Terdapat 3 perusahaan yang mengajukan akses untuk usulan RK melalui aplikasi SINAS NK. Lokasi 3 perusahaan tersebut adalah di wilayah Nunukan dan Sebatik.

Saat pelaksanaan sosialisasi Pelaku usaha menyampaikan agar diberikan keleluasaan agar dapat mendistribusikan ikan ke lingkup 1 provinsi, tidak hanya 1 Kabupaten/Kota perbatasan. Perlu koodinasi lebih lanjut dengan Direktorat PPSDP dan Balai Karantina yang berada di perbatasan karena terdapat potensi pelanggaran oleh pelaku usaha.



Gambar 14. Rapat Sinkronisasi Tata Laksana Pemasukan Hasil Perikanan Berdasarkan Mekanisme Neraca Komoditas di Wilayah Perbatasan Khususnya di Nunukan dan Sebatik

### 5.3. Rapat Lanjutan Pengembangan *Inhouse System* Neraca Komoditas Perikanan

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik, dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data, Statistik dan Informasi, Timja Pemetaan, Timja Pemantauan, dan Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik. Tujuan rapat adalah pembahasan progress pengembangan inhouse system Neraca Komoditas Perikanan KKP. Terdapat inkonsistensi nama komoditas, jadi masih PR (terpending). Menambah rekap menu download pada profil perusahaan, perlu perbaikan data alamat, karena beberapa perusahaan melakukan beberapa kali input data. Hal ini akan direvisi kembali oleh Pusdatin KKP dalam proses revisi. Salah satu penyebab data realisasi di inhouse NK lebih besar adalah karena data volume realisasinya digroupping seharusnya diambil data realisasi terakhir. Tindak Lanjut yang dapat dilakukan adalah Pusdatin akan melakukan penyempurnaan kembali terhadap inhouse system NK Perikanan KKP.





Gambar 15. Rapat Lanjutan Pengembangan Inhouse System Neraca Komoditas Perikanan

#### 1.2.5. Sasaran Kegiatan Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi

#### 6. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan III tercapai 16 Kesepakatan.

Capaian sampai dengan TW III adalah sebesar 16 Kesepakatan atau 114,28% dari target. Adanya peningkatan capaian sebanyak 5 kesepakatan dari periode TW II. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukan kordinasi awal dengan pelaku usaha perikanan untuk dilakukan kesepakatan bersama dalam pengelolaan gudang beku. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW4
6	SK5. Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi						
	IK6. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	PA	14	18	16	88,88

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka pengadaan dan penyimpanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Namun demikian pada tanggal 29 September 2023 telah terbit DIPA penggunaan PNBPN sebesar Rp2.231.771.000,-

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp558.414.571,- atau sebesar 19,51% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 6.1. Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan dalam mendukung Industri Pemindangan

Pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, di Gedung Serbaguna Kantor Dinas Perikanan Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pindang diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari unsur pemerintah: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Prigi), Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, unsur swasta: PT. Dua Putera Perkasa Pertama, PT. Jala Lautan Mulian dan PT. Delta Mina Perkasa, Distributor pemindang di wilayah Tulungagung, para supplier, pengolah dan pemasar hasil perikanan di Tulungagung, Trenggalek, dan Banyuwangi dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan kegiatan “Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan dalam mendukung Industri Pemindangan” adalah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku ikan pindang dan mencapai Indikator Kinerja Utama Direktorat Logistik dalam aspek pengadaan dan penyimpanan, berupa penandatanganan kesepakatan bersama antara

Pelaku Usaha Perikanan Besar dengan Distributor Pemindang dan kesepakatan Distributor Pemindang dengan kelompok pemindang yang merupakan pelaku usaha pada rantai pasok bahan baku usaha pemindangan yang meliputi Distributor (Besar), Pemasok (Supplier) serta Pengolah Pindang yang berasal dari Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.



Gambar 16. Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan dalam mendukung Industri Pemindangan

#### 1.2.6. Sasaran Kegiatan Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan

### 7. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Pembinaan dan Penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul dan Pengolah/industri pengolahan) dan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 18 (delapan belas) kesepakatan.

Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan III tercapai 13 Kesepakatan.

Capaian sampai dengan TW III adalah sebesar 13 Kesepakatan atau 100% dari target. Adanya peningkatan capaian sebanyak 5 kesepakatan dari periode TW II. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan dalam menetapkan jadwal kegiatan. Selain itu telah dilakukan kordinasi awal dengan pelaku usaha perikanan untuk dilakukan kesepakatan bersama dengan pelaku jasa logistik.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW4
7	SK6. Terdistribusikannya hasil perikanan dan penyediaan layanan jasa logistik						
	IK7. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan	Kesepakatan	PA	13	18	13	72,22

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka distribusi hasil perikanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp332.622.513,- atau sebesar 52,79% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

7.1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan Distribusi Hasil Perikanan Menggunakan Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara

Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan Distribusi Hasil Perikanan menggunakan Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Morotai dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 di Ruang Rapat Kantor Bupati Kepulauan Morotai. Rapat ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Morotai. Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut, PT. Pelni; Kepala Stasiun KIMP Ternate; Kepala Cabang PT. Pelni di Ternate; DKP Prov Maluku Utara; DKP Kepulauan Morotai; Pelaku Usaha Perikanan; dan Penyedia Jasa Logistik di Kabupaten Kepulauan Morotai. Tujuan rapat adalah melakukan kordinasi dalam rangka optimalisasi program tol laut di Kabupaten Kepulauan Morotai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Konsolidasi Muatan  
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan mendorong terjadinya konsolidasi muatan di wilayahnya.
2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana  
Dibutuhkan revitalisasi sarana prasarana pelabuhan untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muat yang menjadi pusat konsolidasi

muatan. Salah satu contohnya adalah penambahan fasilitas plugging pada container yard pelabuhan.

### 3. Armada Pengangkut

Dibutuhkan armada pengangkut yang didukung dengan sarana plugging yang mencukupi diatas kapal, serta memperpendek rute/trayek kapal sehingga penyimpanan ikan di pusat produksi tidak overload.



Gambar 17. Rapat Koordinasi Fasilitas Penataan Distribusi Hasil Perikanan Menggunakan Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara

### 7.2. Uji Petik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan

Kegiatan uji petik dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dilaksanakan di beberapa daerah yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2023. Tujuan pengelolaan sistem distribusi ikan adalah untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan yang meliputi kegiatan pengadaan ikan, penyimpanan ikan, dan pengangkutan ikan. Pelaku usaha mengharapkan peraturan tidak memberatkan namun tetap sesuai dengan tujuan penyusunan Permen KP. Perlu adanya pembeda antara pelaku usaha pengolahan (UPI) dan Pelaku usaha yang hanya menjalankan kegiatan penyimpanan saja, sehingga sertifikasi yang diterapkan juga berbeda.

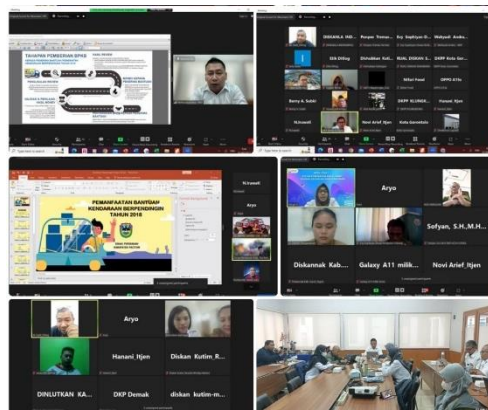


Gambar 18. Uji Petik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan

### 7.3. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 Sebagai Dasar Pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Rapat Pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus melalui offline dan online melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 39 (tiga puluh sembilan) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota pada lokasi penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 secara daring. Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 telah memasuki masa 5 (lima) tahun berjalan, maka diwajibkan membayar pajak atau melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan disertai penggantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang baru setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai persyaratan kendaraan yang dimiliki layak dan legal beroperasi. Penerima Bantuan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 yang akan diberikan BPKB harus membuat & menyerahkan PAKTA INTEGRITAS kepada Direktur Logistik. Adapun pembuatan PAKTA INTEGRITAS dimaksud merupakan jaminan bagi Direktorat Logistik terhadap pemanfaatan kendaraan berpendingin, tidak dipindahtangankan, dijaminkan dan diperjualbelikan baik unit maupun surat-surat kendaraan berpendingin kepada pihak lain.

Melalui sosialisasi dan pemaparan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan kendaraan berpendingin tahun 2018 ini dapat menjadi dasar dalam pemberian BPKB kendaraan berpendingin. Direktorat Logistik berharap melalui pemberian BPKB ini kepada penerima bantuan, pemanfaatan kendaraan berpendingin dapat meningkatkan usaha Koperasi/kelompok masyarakat penerima agar dapat lebih memiliki daya saing, konektivitas logistik serta nilai tambah produk perikanan sehingga terwujudnya pemerataan keterjangkauan pasokan dan ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan konsumsi masyarakat di wilayahnya masing-masing.



Gambar 19. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingin Tahun 2018 Sebagai Dasar Pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

#### 7.4. FGD Fasilitasi Kemitraan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi Bahan Baku Pindang

FGD Fasilitasi Kemitraan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi Hasil Perikanan bertempat di Balai Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023. Pertemuan dibuka oleh Direktur Logistik dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pati, perwakilan eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, pelaku usaha perikanan dan distribusi, pengolah pindang, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten serta UPT Satker PSDKP Juwana. Tujuan kegiatan adalah untuk mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pindang melalui kemitraan pengadaan, penyimpanan dan distribusi ikan di Wilayah Pati dan sekitarnya.



Gambar 20. FGD Fasilitasi Kemitraan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi Bahan Baku Pindang

#### 1.2.7. Sasaran Kegiatan Terbangun dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan

#### 8. Indikator Kinerja Kegiatan Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2023 adalah 19 (sembilan belas) unit. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW 4
8	SK7. Terbangun dan termantfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan						
	IK8. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	19	-	-

Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III terdapat permasalahan yaitu penerima bantuan di Kabupaten Tambrow terlambat menyiapkan pondasi dan keterlambatan pengiriman barang di lokasi Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Gudang Beku Portabel dengan pagu awal sebesar Rp43.108.549.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp8.720.138.000,- namun demikian terdapat recomposisi AA oleh Setditjen PDSPKP untuk mengakomodir kegiatan Kampung Nelayan Maju nilai AA menjadi Rp5.220.138.000,- serta belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp5.416.018.505,- atau sebesar 14,29% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

#### 8.1. Progres Penyaluran Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP)

Telah dilaksanakan pembelian GBP melalui e-Katalog Sektoral terhadap 17 calon penerima yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK PPK. Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia GBP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia GBP

No	Kab/Kota	Penerima	Kapasitas	Penyedia	Kontrak (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Kendari	Koperasi Berkah Samudera Kendari	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.100.000.000	5 Juli-2 Oktober
2	Sumbawa	Poklahsar Mauraya Jaya	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.100.000.000	5 Juli-2 Oktober
3	Kepulauan Sula	Koperasi Nelayan Suka Maju Pelita	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.175.000.000	18 Juli-15 Oktober



No	Kab/Kota	Penerima	Kapasitas	Penyedia	Kontrak (Rp)	Waktu Pelaksanaan
4	Pohuwato	Poklahsar Thomaru 69 Patuhu	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.110.000.000	18 Juli-15 Oktober
5	Halmahera Selatan	Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya	10 ton ABF 1 ton	PT Pura Agro Mandiri	2.269.000.000	10 Juli-27 Oktober
6	Poso	KUB Usaha Karya Mandiri	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.105.000.000	18 Juli-13 November
7	Tasikmalaya	Perkumpulan Pedagang Peternak Ikan dan Ayam Nugraha Jaya Mandiri	10 ton tanpa ABF	PT Pura Agro Mandiri	1.545.189.800	15 September – 28 November
8	Pangkajene Kepulauan	KUB Chanos Jaya	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.180.000.000	15 September – 13 Desember
9	Tambraw	KUB Nusantara	10 ton ABF 1 ton	PT. Cipta Arka Niaga	2.324.000.000	15 September – 13 Desember
10	Biak Numfor	Koperasi Produsen Sumber Binyeri Maju	10 ton ABF 1 ton	PT. Tamacool Sukses Perkasa	2.120.000.000	13 September – 1 November
11	Bandar Lampung	Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran	10 ton tanpa ABF	PT DS Solutions International	1.294.500.000	25 September – 8 Desember
12	Buru Selatan	Koperasi Produsen Simpang Tiga Darmabuana	10 ton tanpa ABF	PT DS Solutions International	2.172.000.000	26 September – 24 Desember
13	Tual	Koperasi Nelayan Nam Ngil	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.170.000.000	26 September – 24 Desember
14	Wakatobi	Kelompok Usaha Bersama Pandalleang Sama	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.155.000.000	26 September – 24 Desember
15	Kep. Sangihe	Kelompok Usaha Bersama Sangihe Mang Sunaung	10 ton ABF 1 ton	PT DS Solutions International	2.173.000.000	26 September – 24 Desember
16	Mukomu ko	Koperasi Produsen Nelayan Sumber Jaya Bantal	10 ton ABF 1 ton	PT. Tamacool Sukses Perkasa	2.030.000.000	26 September – 10 Desember
17	Banggai Laut	Koperasi Produsen Nelayan Benggawi Mitra Bahari	10 ton ABF 1 ton	PT Pura Agro Mandiri	2.213.000.000	27 September – 25 Desember

Untuk pengadaan berikutnya sebanyak 9 unit GBP dalam proses revisi SK Penetapan Penerima GBP Tahap 2 sehubungan dengan calon penerima Kabupaten Tulungagung yang mengundurkan diri dan pengalihan calon penerima untuk mendukung Kalaju prioritas MKP serta mendukung MLIN.

## 8.2. Klarifikasi dan Survei Pasar Produk Gudang Beku Portable PT Cahaya Mas Cemerlang

Survei dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2023 ke kantor PT Cahaya Mas Cemerlang yang beralamat di Jl. Rawagelam II No.3, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur. Tujuannya adalah melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis yang ditawarkan di e katalog. PT Cahaya Mas Cemerlang Berdiri Tahun 1985 dengan bidang usaha terkait Pengolahan Air Bersih dan Pembuatan IPAL, dan alat kesehatan. Usaha terkait sistem pendingin dimulai

tahun 2019 berupa pembuatan Gudang Beku Kontainer dan Knockdown dengan sumber listrik berasal dari tenaga surya (PLTS).

PT Cahaya Mas Cemerlang telah menawarkan produknya di e-Katalog Sektoral KKP dan sudah memiliki TKDN sebesar 41,9% untuk Jenis Produk Gudang Beku, namun demikian secara detail belum melampirkan data dukung spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sesuai dengan Revisi Pengumuman Pendaftaran Nomor B.1713/SJ.6/PL.430/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Sebagai tindak lanjut, PT Cahaya Mas Cemerlang disarankan bersurat ke Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk pemaparan produk Gudang Beku Portabel.



Gambar 21. Klarifikasi dan Survei Pasar Produk Gudang Beku Portable PT Cahaya Mas Cemerlang

### 8.3. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di lokasi penerima bantuan

#### a) Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Rapat dilaksanakan tanggal 19 September 2023 dan dihadiri oleh Dinas Perikanan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Ketua KUB, Perwakilan PT. DS Solution, Perwakilan PLN ULP Pangkep dan tim teknis Direktorat Logistik. Titik lokasi pondasi GBP berada di samping KUB Chanos Jaya dengan titik koordinat Lat -4.786164 dan Long 119.544111. Pondasi akan dibuat dengan luasan 6 x 15 meter dengan kedalaman pondasi 30 cm serta ketinggian lantai Loading minimal 70 cm dari level tanah. Desain GBP yang dipilih oleh penerima adalah opsi A dengan bentuk memanjang menyesuaikan kondisi lahan. Pekerjaan pondasi ditargetkan selesai maksimal 30 hari (termasuk masa pengeringan lantai beton), dimana pekerjaan pondasi mulai dilaksanakan tanggal 25 September 2023. Perwakilan PLN menyampaikan bahwa ada perubahan kebijakan terkait dengan biaya penyambungan baru dimana biaya sharing investasi ditiadakan, pelanggan dapat mengajukan surat kembali ke PLN ULP Pangkep untuk mendapatkan informasi terbaru terkait biaya penyambungan. Lama waktu pengerjaan penyambungan listrik maksimal 30 hari kalender sejak surat permohonan dan biaya penyambungan diterima PLN.



Gambar 22. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

### b) Kabupaten Tambrau

Desain GBP yang akan diadakan sesuai spesifikasi yang ditawarkan penyedia. Paket pembelian GBP sudah termasuk rumah pelindung dan genset. Penerima siap membuat pondasi bangunan sesuai dengan spesifikasi dari penyedia, dengan tinggi lantai 60 cm dari permukaan tanah untuk menghindari genangan air hujan. Waktu pekerjaan pondasi 40 hari Kalender termasuk dengan pembersihan lahan yang memerlukan alat berat. Pekerjaan pembuatan pondasi belum dapat dilaksanakan, menunggu penyelesaian terkait ganti rugi tanaman tumbuh kepada masyarakat yang diagendakan akan dimusyawarahkan oleh Dinas Perikanan tanggal 29 September 2023. Kebutuhan listrik GBP 10 ton dan ABF 1 ton sebesar 33 kVA dimana trafo listrik terpasang sudah tersedia sesuai daya yang dibutuhkan, hanya perlu menambahkan tiang dan penarikan kabel sejauh kurang lebih 80 meter.

Estimasi waktu penyambungan mulai proses pengajuan sampai instalasi selama 30 hari, terkait hal tersebut KUB didampingi Dinas Perikanan segera membuat surat permohonan penyambungan.



Gambar 23. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Tambrau

### c) Kabupaten Biak Numfor

Rapat dilaksanakan tanggal 22 September 2023 dan dihadiri oleh DKP Kab. Biak Numfor, Perwakilan tim teknis Kalaju DJPT, Perwakilan PT Tamacool Sukses Perkasa, Perwakilan PLN UP3 Biak, dan tim teknis Direktorat Logistik. Desain GBP yang akan diadakan sesuai spesifikasi yang ditawarkan penyedia. Pondasi disediakan oleh DJPT melalui pihak ketiga dengan waktu pekerjaan ditargetkan selesai akhir bulan September. Material GBP perkiraan tiba di Biak tanggal 9 Oktober, sehingga bisa langsung diinstal di atas pondasi yang sudah matang. Kebutuhan listrik GBP 10 ton dan ABF 1 ton sebesar 53 kVA dimana material di pihak PLN sudah tersedia dengan estimasi pekerjaan selama 2 minggu setelah NIDI dan SLO terbit. Listrik disediakan oleh DJPT dengan estimasi biaya penyambungan 70 juta, akan dibayarkan melalui TUP Hasil rapat Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir.



Gambar 24. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan BP Gudang Beku Portabel TA 2023 di Kabupaten Biak Numfor

#### 1.2.8. Sasaran Kegiatan Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan

#### 9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2023 adalah 26 (dua puluh enam) unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian

tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV.

Tabel 12. Target dan capaian IK 9

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW 4
9	SK6. Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan						
	IK9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	26	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu QEG Mobil Refrigerasi, Mobil Refrigerasi (MP Korporasi) dan Mobil Refrigerasi mendukung revitalisasi tambak dengan pagu awal sebesar Rp22.652.937.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp6.256.950.000,- namun demikian terdapat recomposisi AA oleh Setditjen PDSPKP untuk mengakomodir kegiatan Kampung Nelayan Maju nilai AA menjadi Rp4.436.950.000,- serta belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp1.218.379.389,- atau sebesar 7,96% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

#### 9.1. Pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA 2023

Telah dilaksanakan pembelian Kendaraan Berefrigerasi melalui e-Katalog Sektoral terhadap 19 calon penerima yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK PPK Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia Kendaraan Berefrigerasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Calon penerima, spesifikasi, dan penyedia Kendaraan Berefrigerasi

No	Kab/Kota	Penerima	Kapasitas	Penyedia	Kontrak (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Pati	Koperasi Rukun Artha Santosa	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	824.708.000	12 Juli - 8 November 2023
2	Karangasem	Kelompok Segara Suci	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	833.370.500	12 Juli - 8 November 2023
3	Indramayu	KUD Misaya Mina	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	818.312.600	12 Juli - 8 November 2023
4	Manado	Koperasi Produksi Karunia	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	856.006.600	12 Juli - 8 November 2023
5	Halmahera Utara	Kelompok Nelayan Budi Luhur	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	709.397.100	2 Agustus – 29 November 2023

No	Kab/Kota	Penerima	Kapasitas	Penyedia	Kontrak (Rp)	Waktu Pelaksanaan
6	Kota Bandung	Poklahsar Kinar Djaya	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	647.301.700	2 Agustus – 29 November 2023
7	Buru Selatan	Koperasi Produsen Selat Pulau Oki	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	724.804.100	2 Agustus – 29 November 2023
8	Karawang	Koperasi Produsen Perikanan Tia Putri Jaya	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	646.746.700	2 Agustus – 29 November 2023
9	Lampung Timur	Koperasi Sinar Laut	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	660.686.100	2 Agustus – 29 November 2023
10	Pandeglang	Pokdakan Barokah Vannamei Lestari	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	661.393.900	2 Agustus – 29 November 2023
11	Pinrang	Pokdakan Masaro Cinnae	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	669.966.100	2 Agustus – 29 November 2023
12	Pringsewu	Koperasi Jasa Gapoktan Mina Sinar Mas	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	660.686.100	31 Agustus – 8 Desember 2023
13	Rembang	KUD Misoyo mardi Marno	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	824.208.000	29 September – 17 Desember
14	Merauke	Koperasi Produsen Nelayan Seluruh Merauke	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	830.613.100	14 September – 16 Desember
15	Halmahera Timur	KUB Buma Mandiri	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	710.449.100	14 September – 16 Desember
16	Kota Ternate	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	690.133.100	14 September – 16 Desember
17	Maluku Tengah	Koperasi Perikanan Mina Lemadang Maluku	Roda 4	PT Hino Motor Sales Indonesia	714.418.100	14 September – 16 Desember
18	Bandar Lampung	Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	830.975.000	22 September – 14 Desember
19	Biak Numfor	Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju	Roda 6	PT Hino Motor Sales Indonesia	812.076.100	14 September – 2 Desember

## 9.2. Rapat Monitoring Progres Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi TA 2023 dan Persiapan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi Tahap 3

Rapat Monitoring Progres Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi TA 2023 dan Persiapan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi Tahap 3 Tanggal 31 Agustus 2023 di Girimulya, Kec. Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana dan dihadiri oleh Inspektur IV KKP, perwakilan PT Hino Motors Sales Indonesia, perwakilan PT Duta Motor Cemerlang, perwakilan Timja Hukum Setditjen PDSPKP, perwakilan Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ Setditjen PDSPKP, Ketua Timja Dukungan Manajerial Direktorat Logistik, dan anggota Timja Prasarana dan Sarana Direktorat Logistik.

Monitoring dilaksanakan terhadap 11 unit kendaraan yang sudah berkontrak dengan PT Duta Cemerlang Motors dimana secara umum progres pekerjaan mengalami deviasi positif. Estimasi pelaksanaan pengiriman unit dimulai pada Minggu I Bulan September 2023 sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari masa berakhir kontrak. Progres pekerjaan sebagaimana terlampir.

Berdasarkan informasi dari penyedia, pelaksanaan pekerjaan paling cepat 100 hari dengan estimasi perakitan boks selama 3 minggu, pekerjaan

mesin pendingin serta aksesoris lainnya selama 60 hari dimana mesin pendingin masih didatangkan dari luar negeri (impor), serta pengiriman ke lokasi 1-3 minggu tergantung wilayah, sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan berikutnya apabila menargetkan selesai pada tanggal 15 Desember 2023, maka tanggal kontrak selambat-lambatnya tanggal 7 September 2023.

Persiapan Penandatanganan Kontrak, Kontrak dilaksanakan untuk pengadaan 1 unit Kendaraan Berefrigerasi roda 4 dengan lokasi penerima di Kabupaten Pringsewu dalam rangka mendukung korporasi. Waktu pelaksanaan pengadaan selama 100 hari dimulai tanggal 31 Agustus dan berakhir tanggal 8 Desember 2023.



Gambar 25. Rapat Monitoring Progres Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi TA 2023 dan Persiapan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi Tahap 3

### 1.2.9. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

## 10. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2023 adalah 8 (delapan) Lembaga.

Tabel 14. Target dan capaian IK 10

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW 4
10	SK9. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang						

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target sd TW 4
	IK10. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	PA	6	8	6	75

Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya pengurangan dari target tahun 2022 sebanyak 2 lembaga atau 20% karena pagu anggaran tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp 200.000.000,- atau sebesar 20% dari tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan TW III Tahun 2023 adalah sebanyak 6 lembaga atau 100% terhadap target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 periode yang sama, capaian pada Tahun 2023 mengalami penurunan 50%. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran *Automatic adjustment* (AA) yang membuat perencanaan penarikan dana berbeda dengan tahun 2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 240.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp396.606.470,- atau sebesar 70,82% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

#### 10.1. Koordinasi Pengembangan SRG Rumput Laut dengan Bappebti

Dalam rangka pengembangan SRG rumput laut tahun 2023, pada tanggal 1 Agustus 2023 Tim Direktorat Logistik telah melakukan koordinasi dengan Bappebti-Kementerian Perdagangan di Jakarta. Tujuannya adalah pemetaan lokasi-lokasi potensial untuk implementasi SRG komoditas rumput laut dan ikan, pembiayaan SRG serta strategi pengembangan SRG di daerah pada semester II tahun 2023. Hal-hal yang dapat dilaporkan sebagai berikut :



- 1) Pada semester 2 tahun 2023 Direktorat Logistik berencana untuk memfokuskan implementasi SRG rumput laut di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara
- 2) Saat ini ada 2 jenis rumput laut yang sedang dikembangkan di Pulau Jawa yaitu cottoni (untuk produk karagenan) yang dikembangkan di wilayah Bekasi dan Graciliria (untuk produk agar-agar dan jelly) yang dikembangkan di Karimun Jawa. Budidaya rumput laut dengan jenis Graciliria pada awalnya dikembangkan di Kab. Palopo dan berkembang di wilayah sekitarnya (Luwu). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar, budidaya rumput laut tersebut dikembangkan juga di pesisir Pulau Jawa pada lahan tambak bandeng dan udang.
- 3) Gudang rumput laut yang terdekat dari Jakarta yang telah disetujui Bappebti berada di Tangerang dengan sistem sewa selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.



Gambar 26. Koordinasi Pengembangan SRG Rumput Laut dengan Bappebti

## 10.2. Rapat Tindaklanjut Permohonan Izin Penggunaan Cold Storage 2000 Ton dan Kerjasama Program Sistem Resi Gudang (SRG) oleh PT Perindo

Dalam rangka menindaklanjuti Surat PT Perindo Nomor B-0033/Dir.A/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal permohonan izin penggunaan cold storage dan kerjasama system resi gudang, pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilaksanakan rapat untuk menindaklanjuti surat tersebut di BBATPP Sempur dan melalui daring. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan dihadiri oleh Perwakilan Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, Bappebti-Kemendag, Perwakilan Itjen IV KKP, Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Humas Setditjen PDSPKP, Perwakilan Tim Kerja BMN dan Pengadaan Barang/jasa Setditjen PDSPKP serta Perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik

Tujuan rapat adalah menelaah permohonan penerapan SRG di CS 2000 ton oleh PT. Perindo melalui kerja sama dengan PT. BGR sebagai calon pengelola gudang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PDSPKP dengan PT. Perindo serta peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan SRG. Rapat menyimpulkan bahwa PT. Perindo tidak dapat bekerja sama dengan PT. BGR (sebagai pengelola gudang) serta PT. Perindo sebagai pemilik ikan yang

akan direvisi dalam menerapkan SRG. Direktorat Logistik akan membuat konsep surat balasan atas surat permohonan PT. Perindo mengacu pada hasil rapat.



Gambar 27. Rapat Tindaklanjut Permohonan Izin Penggunaan Cold Storage 2000 Ton dan Kerjasama Program Sistem Resi Gudang (SRG) oleh PT Perindo

### 10.3. Inisiasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut di Kabupaten Tangerang

Direktorat Logistik telah melaksanakan inisiasi pelaksanaan SRG di Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 sd 28 September 2023. Adapun rencana Lembaga yang akan menerapkan SRG adalah PT. Pundi Nusantara Raya. Peserta yang terlibat Dalam kegiatan yaitu Dinas KP Kabupaten Tangerang, PT. Pundi Nusantara Raya, Bappepti dan BRI. Tujuan kegiatan adalah percepatan implementasi SRG rumput laut di kabupaten Tangerang. Adapun hal-hal yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

- 1) PT. Pundi Nusantara Raya berencana akan melakukan inisiasi kerjasama penyimpanan rumput laut melalui mekanisme SRG dengan 18 pelaku usaha di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. PT. Pundi Nusantara Raya juga berminat untuk membeli rumput laut yang disimpan oleh pemilik barang dan telah bermitra dengan PT Agarindo Bogatama untuk mengolah rumput laut menjadi produk tepung agar untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun ekspor (Jepang dan Amerika)
- 2) Bank BRI Kab. Tangerang bersedia menjadi lembaga pembiayaan SRG dan akan melakukan mapping serta analisa terhadap 18 pelaku usaha yang berminat untuk menyimpan rumput laut di gudang PT. Pundi Nusantara Raya



Gambar 28. Inisiasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut di Kabupaten Tangerang

### 1.2.10. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

#### 11. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 3 (tiga) Lembaga.

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya persamaan target tahun 2022 dengan 2023 yaitu 3 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Terdapat capaian sampai dengan Triwulan III yaitu sebesar 2, atau sebesar 200% dari target sd TW III atau sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 periode yang sama yaitu 2 lembaga.

Tabel 15. Target dan capaian IK 11

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
11	SK10. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang						

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
	difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan						
	IK11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	PA	1	3	2	66,66

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp457.589.660,- atau sebesar 65,36% terhadap pagu setelah AA. Untuk mencapai output sd TW III, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi Kerjasama antara Lembaga pengelola kapal yaitu Pemilik Kapal Penangkap Ikan Makmur Rejeki Santosa dengan Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Asia Jaya 06 pada tanggal 31 Agustus 2023. Tujuannya adalah menjamin keberlangsungan transportasi hasil perikanan berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, keberlanjutan, adil dan saling menguntungkan.

### 1.2.11. Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen

## 12. Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)

Definisi indikator ini adalah Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Layanan.

Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan III, karena merupakan Layanan publik yang akan dilaporkan dalam 1 tahun pada triwulan IV.

Tabel 16. Target dan capaian IK 12

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
12	SK11. Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen						
	IK12. Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BAH Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen dengan pagu awal sebesar Rp500.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp150.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp240.927.856,- atau sebesar 68,83% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 12.1. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut dan di Darat

Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 di ruang rapat Abbas Sachlan, BRPBATPP, Sempur, Bogor melalui hybrid luring dan daring melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kasubdit Pelayanan Kementerian Investasi/BKPM RI, Perwakilan Eselon 1 lingkup KKP dan Pimpinan Perusahaan Perikanan PMA/PMDN. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada peserta terhadap pelayanan perizinan jasa pasca panen. Pelaku usaha mendapatkan informasi tentang Tata Cara Pengembangan PB dengan penyesuaian bidang usaha, pengisian data proyek, lokasi kegiatan, cetak RDTR, Validasi Risiko, Deskripsi Kegiatan Usaha sampai NIB Terbit sesuai pengembangan bidang usaha. Pada tahun 2022 KKP telah termasuk Nomine 8 (delapan) terbaik Kementerian/Lembaga, dan pada tahun 2023 ini masih proses penilaian oleh Kementerian Investasi/OSS.



Gambar 29. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut dan di Darat

### 1.2.12. Sasaran Kegiatan Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

## 13. Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan berupa IPAL yang berfungsi untuk mendukung fungsi bangunan penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit.

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, karena merupakan indikator yang dimasukkan dalam *automatic adjustment*.

Tabel 17. Target dan capaian IK 13

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
13	SK12. Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton						

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
	IK13. Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan, meskipun keseluruhan anggaran di blokir automatic adjustment sebagai kebijakan sehingga belum bisa digunakan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp 381.296.000,-. Adanya blokir anggaran Automatic adjustment (AA) sebesar Rp 381.296.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Namun demikian pada tanggal 29 September 2023 telah terbit DIPA penggunaan PNBP, sehingga ada tambahan anggaran sebesar Rp200.000.000,-

### 1.2.13. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku

## 14. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Penerapan sistem informasi pengelolaan gudang beku 1000 ton mengacu pada Warehouse Management System (WMS). Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit. Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan III.

Tabel 18. Target dan capaian IK 14

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
14	SK13. Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku						
	IK14. Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem informasi pengelolaan gudang beku dengan pagu awal sebesar Rp225.496.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp206.382.023,- atau sebesar 91,52% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 14.1. Sosialisasi Warehouse Management System (WMS) Versi 1.0

Dalam rangka mendukung digitalisasi dan operasional/pemanfaatan Cold Storage (Gudang Beku) Bantuan Pemerintah/Cold Storage 1000 Ton, Direktorat Logistik telah membangun Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Beku Warehouse Management System (WMS), Direktorat Logistik Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan-KKP telah melaksanakan Sosialisasi Warehouse Management System (WMS) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 secara hybrid di Hotel Amarosa – Bekasi.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini antara lain: 1) Digitalisasi pendataan ikan di gudang beku berdasarkan asal ikan, volume, jenis, harga jual, harga beli, tujuan pemasaran, stok ikan yang tersedia, 2) Memberikan kemudahan perhitungan PNPB bagi pengelola gudang beku melalui pencatatan digital (besaran nilai PNPB yang berlaku bagi mitra pelaku usaha), 3) Menyediakan pelaporan secara lengkap dan akurat bagi pengelola Gudang beku dan mitra pelaku usaha sehingga memberikan kemudahan pemantauan ketersediaan ikan secara real time (waktu nyata), dan 4) Memudahkan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dengan implementasi digitalisasi pendataan ikan di cold storage berdasarkan asal ikan, volume, jenis, harga jual, harga beli, tujuan pemasaran, stok ikan yang tersedia, diharapkan dengan adanya WMS, pelaporan secara lengkap dan akurat bagi pengelola CS, kemudahan pemantauan ketersediaan ikan secara real time (waktu nyata), dan kemudahan monev cs dapat terwujud.



Gambar 30. Sosialisasi Warehouse Management System (WMS) Versi 1.0



### 1.2.14. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

#### 11. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 242 (dua ratus dua puluh empat) unit.

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan III.

Tabel 19. Target dan capaian IK 15

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWIII	TA 2023	Sd TWIII	% thd target TW 4
15	SK14. Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku						
	IK15. Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	PA	-	242	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW III tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp1.208.408.000,-. Namun demikian terdapat tambahan anggaran yang bersumber dari penggunaan PNBPNP per tanggal 29 September 2023, sehingga anggaran menjadi sebesar Rp3.602.908.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp362.522.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW III adalah sebesar Rp839.206.832,- atau sebesar 25,89% terhadap pagu setelah AA.

### 1.2.15. Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

#### 12. Nilai PNBP Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Adanya peningkatan target tahun 2023 sebesar 3,27 milyar atau meningkat 96,46% dari target tahun 2022. Target PNBP tahun 2023 sebesar 6,66 milyar. Capaian tahun 2022 sebesar Rp4.709.973.923,- atau setara dengan 138,9% dari target tahun 2022. Capaian PNBP sampai dengan TW III adalah sebesar Rp4.969.325.969,- atau sebesar 75,29% dari target tahun 2023. Namun capaian sampai dengan TWIII tidak dapat dilaporkan karena target bersifat tahunan.

Tabel 20. Target dan capaian IK 16

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW III	TA 2023	Sd TW III	% thd target 2023
16	SK15. Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP						
	IK16. Nilai PNBP Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)	Unit	PA	-	6,66 milyar	-	-

### 1.2.16. Sasaran Kegiatan Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

### 13. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik. Target indikator tahun 2023 adalah sebesar 1215 orang.

Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Terdapat peningkatan target tahun 2023 sebesar 90 tenaga kerja yang terlibat atau sebesar 8% target 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Target pelaporannya adalah pada TW IV, capaian tahun 2022 sebesar 1439 orang yang terdiri dari 1312 orang tenaga kerja tidak langsung/ penerima bantuan pemerintah dan sebesar 127 orang tenaga kerja langsung/ proyek.

Tabel 21. Target dan capaian IK 17

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
17	SK16. Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP						
	IK17. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)	Unit	PA	-	1215 orang	-	-

### 1.2.17. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Logistik

#### 14. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,2 sedangkan target semester II adalah sebesar 83,2. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Perhitungannya adalah semesteran. Capaian pada semester I adalah sebesar 79 atau mencapai 103,94%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 periode yang sama, terjadi peningkatan sebesar 8,9% atau 6,5 poin.

Tabel 22. Target dan capaian IK 18

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				s.d. TW 3	TA 2023	s.d. TW 3	% thd target SM2
18	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK18. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik (Indeks)	Indeks	SM	-	83,2	-	-

## 15. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 80,5. Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 23. Target dan capaian IK 19

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target sd TW4
19	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	80,5	-	-

## 16. Indikator Kinerja Kegiatan Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Direktorat Logistik tahun 2022.

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target sebesar  $\leq 0,5$ . Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 24. Target dan capaian IK 20

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sd TWIII	TA 2023	sd TWIII	% thd target sd TW 4
20	Sk17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK20. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	PA	-	≤0,5	-	-

### 17. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh unit Direktorat Logistik. Persentase unit kerja yang melaksanakan Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW III adalah sebesar 98,31 atau 131,08% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW III pada tahun 2022, capaian 93 atau naik 5,7% dari capaian TW III tahun 202. Kemudian adanya peningkatan sebesar 1,31 poin dari capaian TW II. Hal ini disebabkan dari 178 rekomendasi, 175 tuntas dan 3 rekomendasi masih berproses.

Tabel 25. Target dan capaian IK 21

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target 2023
21	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	75	75	98,31	131,08

## 18. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik Tahun 2023 ditargetkan sebesar 92. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW III adalah sebesar 133,33 atau 144,92% dari target. Ada peningkatan dari capaian TW II sebesar 33,33%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW II pada tahun 2022, capaiannya meningkat 33,33%. Adanya peningkatan dari target tahun 2023 yaitu dari 86 menjadi 92 atau naik 6 poin dari tahun 2022.

Tabel 26. Target dan capaian IK 22

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target TW IV
22	S17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK22. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	92	92	133,33	144,92

## 19. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran.

Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 95%. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga

dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian akan dilaporkan pada TW IV.

Tabel 27. Target dan capaian IK 23

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target TW 4
23	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	95	-	-

## 20. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Direktorat Logistik terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW III belum ada capaian.

Tabel 28. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target TW IV
24	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-



## 21. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Logistik . Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV tahun 2023 dengan Persentase Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%) ditargetkan sebesar 77,5. Indikator kegiatan ini merupakan lanjutan dari indikator tahun 2022, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 99 atau sebesar 132% dari target 2022.

Tabel 29. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target TW 4
25	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-

## 22. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW III belum ada capaian.

Tabel 30. Target dan capaian IK 26

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWIII	TA 2023	TWIII	% thd target TW 4
26	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK26. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	77,5	-	-

### 3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Pagu Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2023 setelah penambahan anggaran yang berasal dari pemanfaatan PNBPN total semula Rp77.144.186.000,- menjadi Rp81.970.457.000,- sedangkan total anggaran blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 13.024.823.000,- yang tersebar pada 13 Rincian Output (RO).

Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan TW III adalah sebesar Rp12.519.588.676,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar **15,27% (sumber data Aplikasi Omspan dan Sakti)** Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 31. Realisasi anggaran Direktorat Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000.000.000	1.646.333.000	1.227.610.461
2	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Jumlah data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.467.500.000	1.027.250.000	619.355.334
3	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	Jumlah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	700.000.000	490.254.051
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.000.000.000	700.000.000	516.221.011
4	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan	3.131.771.000	2.861.771.000	558.414.571
5	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	Kemitraan dalam rangka distribusi hasil perikanan	900.000.000	630.000.000	332.622.513

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	Pengadaan Gudang Beku Portable	43.108.549.000	37.888.411.000	5.416.018.505
7	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	Jumlah pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin)	18.296.607.000	13.859.657.000	1.104.273.794
					Pengadaan Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730.000	1.742.730.000	28.839.000
					Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613.600.000	2.613.600.000	85.266.595
8	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	800.000.000	560.000.000	396.606.470
9	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan	Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	1.000.000.000	700.000.000	457.589.660
10	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	Jumlah Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	500.000.000	350.000.000	240.927.856
11	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	581.296.000	200.000.000	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
12	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	Sistem informasi pengelolaan gudang beku	225.496.000	225.496.000	206.382.023
13	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	3.602.908.000	3.240.386.000	839.206.832

(sumber : Sakti)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Juli sampai dengan September 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan TW III sebesar 110,86. Nilai capaian TW III naik 3,14 poin atau sebesar 2,9% dari capaian TW II. Jika dibandingkan dengan capaian periode sama tahun 2022 sebesar 106,74, maka terjadi peningkatan sebesar 4,12 poin. Hal ini disebabkan adanya peningkatan capaian lebih diatas target pada IKK 6 Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan), IKK 11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga), IKK 21. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik dan IKK 22. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama TW III Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Pada IK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)
  - Terdapat kendala teknis pada aplikasi STELINA
  - Kurangnya kesadaran pelaku usaha yang masih rendah untuk melakukan implementasi STELINA
2. Pada IKK3. Data dan informasi logistik hasil KP (Data)
  - Responden IKLI belum memiliki pemahaman dalam pengisian kuisisioner penghitungan IKLI khususnya pada dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan
  - Pelaku usaha belum mempunyai inisiatif dalam pengisian kuisisioner data stok setiap bulannya
3. Pada IKK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)
  - Penyalahgunaan jenis penggunaan/peruntukan hasil perikanan impor
  - Pengguna hasil perikanan impor (supplier dan pengolah) belum teregistrasi (NIB)
  - Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha di bidang pengolahan/pemasaran hasil perikanan

4. Pada IKK 8 Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)
  - Penerima bantuan di Kabupaten Tambraw terlambat menyiapkan pondasi
  - Keterlambatan pengiriman barang di lokasi Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan rekomendasi untuk perbaikan pada Triwulan IV yaitu sebagai berikut :

1. Pada IKK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)
  - Kordinasi dengan programmer untuk memperbaiki bug pada aplikasi.
  - Kordinasi dengan pelaku usaha dalam implementasi STELINA
  - Penyusunan naskah akademik perubahan regulasi permen KP tentang stelina
2. Pada IKK3. Data dan informasi logistik hasil KP (Data)
  - Kordinasi dengan Responden IKLI dalam pengisian kuisisioner penghitungan IKLI khususnya pada dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan
  - Kordinasi dengan pelaku usaha dalam pengisian kuisisioner data stok setiap bulannya
3. Pada IKK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)
  - Kordinasi dengan pelaku usaha tentang jenis penggunaan/peruntukan hasil perikanan impor
  - Kordinasi dengan pengguna hasil perikanan impor (supplier dan pengolah) tentang pentingnya NIB
  - Sosialisasi kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha di bidang pengolahan/pemasaran hasil perikanan
4. Pada IKK 8 Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)
  - Kordinasi dengan penerima bantuan di Kabupaten Tambraw untuk percepatan menyiapkan pondasi
  - Kordinasi dengan penyedia untuk percepat pengiriman barang di lokasi Kabupaten Kepulauan Sula

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.